

**RENCANA KERJA  
DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Telp (0322) 321338 – Fax (0322) 321338  
e-mail : [dinkes@lamongankab.go.id](mailto:dinkes@lamongankab.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

LAMONGAN

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan untuk tahun anggaran 2018 yang akan datang.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ini dapat berguna bagi kita semua.

Lamongan, April 2017

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMONGAN**



**dr. TAUFIK HIDAYAT**

Pembina Tk I

NIP. 19630702 198903 1 012

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan.....	31
II.3 Isu –Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	32
II.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD .....	33
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	35
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	35
III.2 Sasaran .....	35
III.3 Program dan Kegiatan .....	36
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan hendaknya disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan menyiapkan Renja PD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPDP dan berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Badan/Dinas/Kantor/PD di Lingkungan Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Renja PD dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum PD dan Pra Musrenbang Kabupaten.

Dari kegiatan tersebut diatas, tersusunlah Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) untuk diajukan ke Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Lamongan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dilengkapi dengan lampiran-lampiran indikator program dan kegiatan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2018 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Th.2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJPD dan RPJMD dan Renstra SKPD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
9. PerMenKes RI Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 8/Menkes/SK/V/2008 tentang Juknis SPM;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

**Maksud** :Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program-program pembangunan ke dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Selain untuk menjabarkan visi, misi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan dibidang kesehatan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

**Tujuan** : Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2018 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan kerja yang memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang ingin dicapai selama satu tahun berjalan.

Perencanaan pembangunan satu tahun berjalan ini akan dijabarkan menjadi rencana kerja tahunan masing-masing program, sehingga usulan kegiatan masing-masing program tetap mengarah pada tujuan yang diharapkan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2018 terdiri dari empat bab dan beberapa lampiran. Lampiran Renja memuat Daftar program menurut kegiatan program selama satu tahun. Formulir RPJMD 2016-2021, Daftar Target Kinerja, Daftar Kebijakan dan Program serta rencana pembiayaan Renja disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut :

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut :

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Memuat tentang tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampak pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap pencapaian target SPM dan MDGs.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun PD Kabupaten yang langsung ditujukan Kepala PD Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan).

### **Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut :

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

#### **3.2 Telaahan Renstra**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

#### **3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD**

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### **Bab IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi renja ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.

### **Lampiran**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2016.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2016 dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan yaitu sebesar Rp. 180.768.715.489,- dari total anggaran sebesar Rp. 194.359.941.372,- atau mencapai 93,01%.

Realisasi anggaran berdasarkan anggaran tahun 2016 dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 7.793.597.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.622.396.972,- atau 84,97%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 3.103.215.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.024.530.730,- atau 97,46%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 399.475.000,- atau 99,87%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.340.000,- atau 96,98%.
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.727.708.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.427.351.220,- atau 96,11%.
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 83.369.308.049,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.745.101.992,- atau 88,46%.
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 6.278.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.269.800.000,- atau 99,86%.
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 1.550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.527.910.600,- atau 98,57%.
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan anggaran sebesar Rp. 5.615.855.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.563.049.065,- atau 99,06%.
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan anggaran sebesar Rp. 1.424.092.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.367.553.800,- atau 96,03%.

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.820.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.412.834.917,- atau 85,56%.
12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan anggaran sebesar Rp. 1.386.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.019.131.242,- atau 73,52%.
13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dengan anggaran sebesar Rp. 61.347.966.519,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.349.723.144,- atau 98,37%.
14. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.559.100,- atau 99,12%.
15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 629.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 626.747.150,- atau 99,64%.
16. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp. 3.995.058.104,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.537.786.744,- atau 88,55%.
17. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp. 6.688.941.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.647.433.813,- atau 99,38%.
18. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.990.000,- atau 99,99%.

**tabel II.1 - II.2 di**

*tabel II.1 - II.2 di*  
**excel**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2016-2021) dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Dari hasil pencapaian program kegiatan tahun 2016 bisa dilihat bahwa capaian tersebut sudah berhasil dan tidak menemui kendala, sedangkan perkiraan capaian program kegiatan tahun 2018 diperkirakan bisa memenuhi target yang ada.

**1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja sebanyak 4 item dari 30 item sebagai berikut :**

- a. Prevalensi penyakit TB;
- b. Cakupan kunjungan bayi;
- c. Non polio AFP rate;
- d. Prosentasi jumlah Puskesmas yang terakreditasi.

**2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja sebanyak 17 item dari 30 item sebagai berikut :**

- a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
- c. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization;
- d. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
- e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
- f. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota;
- g. Cakupan kunjungan ibu hamil K4;
- h. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani;
- i. Cakupan pelayanan nifas;
- j. Cakupan pelayanan anak balita;
- k. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;
- l. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;
- m. Penanganan kasus HIV;
- n. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani;
- o. Cakupan KLB desa atau kelurahan yang ditangani <24 jam;
- p. Rasio Nakes (Medis, Paramedis, Non Medis) dibanding jumlah penduduk;
- q. Rumah sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar.

**3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja sebanyak 9 item dari 30 item sebagai berikut :**

- a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup;
- b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;
- c. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+);
- d. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
- e. Cakupan posyandu aktif;
- f. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin;
- g. Cakupan desa siaga aktif purnama dan mandiri (Puri);
- h. Penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat disarana kesehatan Pemerintah;
- i. Rumah tangga sehat.

**4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan disebabkan oleh :

- Meningkatnya kasus TB pengobatan ulang
- Meningkatnya kasus TB MDR 65% dari tahun 2015
- Keterlambatan diagnosis kasus TB secara dini
- Kepatuhan pasien minum obat masih rendah
- Masih adanya pemberi pelayanan pengobatan TB tidak sesuai standar DOTS
- Rendahnya capaian kunjungan bayi paripurna
- Belum semua RS masuk jejaring surveilans sehingga memungkinkan adanya kasus yang tidak dilaporkan
- Kasus AFP yang dilaporkan semua berasal dari RS, sedangkan dari Puskesmas masih kurang berani untuk mendiagnosis kasus AFP sehingga belum ada laporan kasus dari Puskesmas

**5. Kebijakan/tindakan yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab tersebut**

- Meningkatkan penyuluhan dan pemahaman kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengobatan TB sesuai dengan juknis program pengobatan
- Melibatkan penyedia pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta untuk mengikuti standar pengobatan ISTC (International Standart for TB Care)
- Mendorong skrining Tuberkulosis pada kelompok rentan TB sekaligus melaksanakan pengendalian TB kolaborasi HIV
- Penguatan pengawasan pengobatan oleh PMO
- Meningkatkan kualitas layanan ANC dengan melaksanakan ANC terpadu
- Membangun jejaring surveilans terhadap RS yang belum masuk dan menindaklanjuti dengan kunjungan rutin melalui kegiatan surveilans aktif
- Meningkatkan sensitivitas diagnosis kasus yang bisa dilaporkan sebagai kasus AFP

## II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan.

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamongan

No.	Indikator	SPM / Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian SPM
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Cakupan kunjungan ibu hamil K-4		95.60	95.60	95.62	95.64	95.66	95.68	95.69	95.60
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		100	100	100	100	100	100	100	80.03
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		99.90	99.90	100	100	100	100	100	99.90
4.	Cakupan pelayanan nifas		99.79	99.79	99.82	99.85	99.88	99.90	99.95	99.79
5.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani		100	100	100	100	100	100	100	82.15
6.	Cakupan kunjungan bayi		96.10	98.92	98.94	98.96	98.98	99.00	99.02	96.04
7.	Cakupan desa/kelurahan Universal Immunization Child		94.30	94.30	94.73	95.15	95.57	95.99	96.41	94.30
8.	Cakupan pelayanan anak balita		91.43	91.43	91.46	91.49	91.56	92.00	92.50	91.43
9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan		100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		100	100	100	100	100	100	100	100
12.	Cakupan peserta KB Aktif		-	-	-	-	-	-	-	100
13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :									
	Penemuan penderita AFP		1.83	2	2	2	2	2	2	1.83
	Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita		100	100	100	100	100	100	100	100

	Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif		78.91	72.54	73.03	73.51	74.06	74.47	75.02	78.91
	Penemuan dan penanganan DBD		100	100	100	100	100	100	100	100
	Penanganan penderita diare		-	-	-	-	-	-	-	100
14.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		111.02	100	100	100	100	100	100	111.02
15.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		2.37	1.30	1.23	1.18	1.15	1.13	1.12	2.37
16.	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yg harus diberikan sarana		100	100	100	100	100	100	100	100
17.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan		100	100	100	100	100	100	100	112.50
18.	Cakupan desa siaga aktif		-	-	-	-	-	-	-	100

### II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan sampai pada tahun 2016 dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian Renstra.

Isu-isu penting yang dirumuskan berkaitan dengan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kesehatan.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan adalah :

1. Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menurut standar MDGs;
2. Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
3. Belum optimalnya jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
4. Belum optimalnya penanganan masalah gizi;
5. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana;

6. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat;
7. Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung;
8. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
9. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan;
10. Belum optimalnya pelayanan Jaminan Kesehatan.

#### II.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
		2017	2018
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.399.151.500	7.177.509.500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.186.750.000	40.273.000.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.000.000	225.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000	355.000.000
5	Program Obat dan perbekalan Kesehatan	60.50.000.000	-
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	92.271.121.067	-
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.240.000.000	-
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.650.000.000	-
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.495.000.000	-
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.225.000.000	2.030.000.000
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.929.267.000	-
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4.089.052.000	-
13	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	29.440.000.000	28.650.870.000
14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	50.000.000	-
15	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	40.000.000	-
16	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	840.000.000	-
17	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas	7.097.716.070	-
18	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper	2.869.769.632	-
19	Program Sumber Daya Kesehatan	-	50.000.000
20	Program Pelayanan Kesehatan	-	82.642.953.567
21	Program Kesehatan Masyarakat	-	7.807.097.000
	<b>Jumlah</b>	<b>192.072.827.267</b>	<b>169.211.430.067</b>



## **II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari bidang Perencanaan dan Keuangan yang kemudian di konsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. RKA kemudian di kirim kepada Pemda Kabupaten Lamongan dan diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2016 - 2021 dan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan Nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan melalui program-program pelayanan Kesehatan dan upaya kesehatan rujukan, kesehatan keluarga, pencegahan dan pembrantasan penyakit, penyehatan lingkungan permukiman, pemberdayaan kesehatan masyarakat, farmasi, makanan dan minuman, dan sumber daya kesehatan.

Terkait upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melengkapi sarana dan prasarana antara lain : Puskesmas 33 unit, Puskesmas Pembantu 109 unit, Poskesdes 474 unit, Ponkesdes 161 unit, Polindes 217 unit, Posyandu 1.742 unit. Sumber daya manusia kesehatan yang tersedia adalah : Dokter Umum 62 orang, Dokter Gigi 30 orang, Perawat 287 orang, Bidan 410 orang, Perawat Gigi 16 orang, Asisten Apoteker 10 orang, Sanitasi 12 orang, Nutrisionis 21 orang, Analis Kesehatan 15 orang, dan Tenaga Administrasi 313 orang, Rumah Sakit Swasta 9 unit dan Rumah Sakit Daerah sebanyak 2 unit yakni RSUD Dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang, Klinik 65 unit, dan Apotek sebanyak 95 unit.

Puskesmas sebagai pelayan kesehatan terdepan pada tahun 2016 mampu melayani kunjungan Rawat Jalan di strata 1 di puskesmas sebanyak laki-laki : 258.438 jiwa, perempuan : 387.658 jiwa dengan total keseluruhan 646.096 jiwa, mampu melayani pelayanan kesehatan dasar kunjungan rawat inap di strata 1 atau di puskesmas sebanyak laki-laki : 3.688 jiwa, perempuan : 5.533 jiwa dengan total keseluruhan 9.221 jiwa.

#### **III.2 Sasaran**

Renja ini disesuaikan dengan Renstra yang telah mengalami perubahan, yaitu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021. Renstra ini disusun dengan lebih mensinkronkan program dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah :

1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak yang terdiri dari angka kematian ibu sebesar 74 per 100.000 KH dan angka kematian bayi sebesar 6 per 1.000 KH.
2. Meningkatkannya status gizi masyarakat yang terdiri dari persentase Penurunan Balita Giber sebesar ↓ 0.68% 145 giber

3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular terdiri dari Cascade HIV/AIDS sebesar 100%, Prevalensi Kusta sebesar <1/10.000, Angka bebas pasung sebesar 100%, CNR seluruh kasus TB sebesar 186/100.000, Succes Rate TB BTA (+) sebesar 90% dan Desa Open Defecation Free (ODF) sebesar 474 Desa.
4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terdiri dari Persentase Puskesmas Terakreditasi sebesar 67% 22 PKM.

### **III.3 Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2016-2021.

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Sumber Daya Kesehatan
6. Program Pelayanan Kesehatan
7. Program Kesehatan Masyarakat
8. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2018. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2018 masih mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yang masih memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehinggadiharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruhpihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.